



BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 51 TAHUN 2015 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA DESA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH UNTUK SETIAP DESA KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa maka perlu merubah Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Nomor 10 Tahun 2007, Seri E Noor seri 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK SETIAP DESA KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2015 Nomor 51), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Penyediaan dana untuk ADD beserta fasilitasnya dianggarkan pada DPKAD Kabupaten Barito Kuala setiap tahunnya.
- (2) Penyaluran dana ADD dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Desa secara bertahap sesuai peraturan yang mengatur dana bantuan keuangan yang bersumber dari APBD.
- (3) Penyaluran ADD secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam 2 (dua) Tahapan.
- (4) Penyaluran ADD dapat dilakukan setelah di verifikasi oleh pihak Kecamatan, rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan penyaluran oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (5) Bukti verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan oleh kecamatan apabila desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahunan dan/ tahapan sebelumnya beserta dokumen permohonan pencairan tahun berkenaan.

- (6) Pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan rekomendasi pencairan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa apabila Desa telah menyampaikan :
- a. bukti telah diverifikasi oleh kecamatan;
 - b. surat pertanggungjawaban mutlak telah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban ADD tahun sebelumnya; dan
 - c. dokumen usulan permohonan pencairan ADD yang terdiri dari Surat Permohonan Pencairan dari Desa kepada Kecamatan, Surat Permohonan Pencairan dari Kecamatan kepada Bupati Cq. BPMPD Kabupaten Barito Kuala, RPJM Desa, RKP Desa, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Desa Tahun berkenaan, Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Bersama BPD dan Kepala Desa tentang Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Peraturan Desa tentang Penggunaan ADD, Rencana Anggaran Biaya, Keputusan Kepala Desa tentang Pengguna Anggaran, Keputusan Kepala Desa tentang Bendahara Desa, dan fotocopy rekening giro desa.
- (7) Pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah apabila Desa menyampaikan :
- a. bukti telah diverifikasi dari kecamatan;
 - b. rekomendasi dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - c. Kwitansi pencairan ADD sesuai tahapan (bermaterai)
 - d. surat pernyataan penggunaan ADD (bermaterai);
 - e. surat pertanggungjawaban mutlak (bermaterai);
 - f. fakta integritas (bermaterai);
 - g. peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berkenaan beserta lampiran;
 - h. laporan hasil realisasi ADD tahun sebelumnya; dan
 - i. Fotocopy rekening giro desa.
 - j. Usulan permohonan pencairan ADD dari Kecamatan serta rencana penggunaan
- (8) Rekening pemerintah Desa dibuka di Bank Umum Pemerintah masing-masing kecamatan terdekat, berdasarkan Keputusan Kepala Desa.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) angka 1, angka 2 dan angka 3 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa yang akan melaksanakan kegiatan, mengajukan Rencana Penggunaan Dana/RPD yang disesuaikan dengan hasil musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan. Mekanisme Pencairan Alokasi Dana Desa dibagi dalam 2 (dua) tahap yaitu :
1. Tahap Pertama sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah keseluruhan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2016 yang akan diterima setiap Desa setelah

menyampaikan persyaratan sebagaimana disebutkan pada pasal 7 ayat (5)

2. Tahap Kedua sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2016 yang akan diterima setiap Desa apabila telah mempertanggung jawabkan dana tahap pertama sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dengan dilampiri laporan realisasi fisik dan keuangan beserta laporan pertanggungjawaban tahap pertama Alokasi Dana Desa tahun anggaran berkenaan.

3. Dihapus.

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2016 terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa).
- (2) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari dana Alokasi Dana Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :
 - a. Laporan Berkala, yaitu laporan penggunaan Alokasi Dana Desa di kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2016 yang dibuat secara bertahap setiap pencairan dana meliputi Laporan Tahap I dan Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya yang memuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja.
 - b. Laporan Akhir, yaitu Laporan Pertanggungjawaban Realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2016 mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian akhir penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Barito Kuala.
- (3) Penyampaian Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui jalur struktural, yaitu dari Bendahara Desa dan diketahui Kepala desa disampaikan kepada Camat cq. Tim Pendamping Kecamatan paling lambat minggu keempat bulan januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada Camat cq. Tim Pendamping Kecamatan paling lambat minggu keempat bulan januari tahun anggaran berjalan. Tim Pendamping Kecamatan membuat rekapitulasi seluruh laporan dari tingkat Desa di wilayah kecamatan dilampiri laporan dari tingkat desa dan

dilaporkan kepada Bupati cq Kepala BPMPD paling lambat tanggal minggu kedua bulan Februari tahun bekernan.

- (5) Apabila Kepala Desa tidak menyampaikan laporan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Tim Pembina dan Pengawas Pengelolaan Keuangan Desa akan melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2016 secara langsung pada Desa yang bersangkutan.
- (6) Pelaporan ini diperlukan dalam rangka pengendalian dana untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADD yang meliputi :
 - a. Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana;
 - b. Masalah yang dihadapi;
 - c. Hasil akhir penggunaan ADD;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2016;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala;

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 4 April 2016

BUPATI BARITO KUALA



H. HASNUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 5 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA



H. SUPRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2016 NOMOR 16

**PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA
 BAGI DESA SE KABUPATEN BARITO KUALA
 TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH ADD	TAHAP I 60%	TAHAP II 40%
1	TABUNGANEN	TANGGUL REJO	428,855,900	257,313,540	171,542,360
2	TABUNGANEN	SUNGAI TERAS DALAM	392,782,600	235,669,560	157,113,040
3	TABUNGANEN	KUALA LUPAK	428,855,900	257,313,540	171,542,360
4	TABUNGANEN	SUNGAI TERAS LUAR	392,782,600	235,669,560	157,113,040
5	TABUNGANEN	TABUNGANEN TENGAH	410,819,300	246,491,580	164,327,720
6	TABUNGANEN	BERINGIN KENCANA	410,819,300	246,491,580	164,327,720
7	TABUNGANEN	KARYA BARU	392,782,600	235,669,560	157,113,040
8	TABUNGANEN	TABUNGANEN PEMURUS	464,928,370	278,957,022	185,971,348
9	TABUNGANEN	SUNGAI JINGAH BESAR	374,746,000	224,847,600	149,898,400
10	TABUNGANEN	TABUNGANEN MUARA	392,782,600	235,669,560	157,113,040
11	TABUNGANEN	SUNGAI TELAN MUARA	374,746,000	224,847,600	149,898,400
12	TABUNGANEN	SUNGAI TELAN KECIL	374,746,000	224,847,600	149,898,400
13	TABUNGANEN	TABUNGANEN KECIL	356,709,300	214,025,580	142,683,720
14	TABUNGANEN	SUNGAI TELAN BESAR	374,746,000	224,847,600	149,898,400
15	TAMBAN	TAMBAN MUARA	446,892,500	268,135,500	178,757,000
16	TAMBAN	TAMBAN BANGUN	410,819,300	246,491,580	164,327,720
17	TAMBAN	DAMSARI	392,782,600	235,669,560	157,113,040
18	TAMBAN	TAMBAN MUARA BARU	410,819,300	246,491,580	164,327,720
19	TAMBAN	SEKATA BARU	410,819,300	246,491,580	164,327,720
20	TAMBAN	TAMBAN BANGUN BARU	392,782,600	235,669,560	157,113,040
21	TAMBAN	KOANDA	374,746,000	224,847,600	149,898,400
22	TAMBAN	PURWOSARI BARU	410,819,300	246,491,580	164,327,720
23	TAMBAN	TAMBAN SARI BARU	374,746,000	224,847,600	149,898,400
24	TAMBAN	TAMBAN KECIL	392,782,600	235,669,560	157,113,040
25	TAMBAN	PURWOSARI II	374,746,000	224,847,600	149,898,400
26	TAMBAN	JELAPAT I	446,892,500	268,135,500	178,757,000
27	TAMBAN	JELAPAT BARU	410,819,300	246,491,580	164,327,720
28	TAMBAN	SIDOREJO	392,782,600	235,669,560	157,113,040
29	TAMBAN	TINGGIRAN II	428,855,900	257,313,540	171,542,360
30	TAMBAN	PURWOSARI I	392,782,600	235,669,560	157,113,040
31	MEKARSARI	INDAH SARI	392,782,600	235,669,560	157,113,040
32	MEKARSARI	TINGGIRAN BARU	428,855,900	257,313,540	171,542,360
33	MEKARSARI	KARANG MEKAR	392,782,600	235,669,560	157,113,040
34	MEKARSARI	TINGGIRAN DARAT	446,892,500	268,135,500	178,757,000
35	MEKARSARI	TINGGIRAN TENGAH	410,819,300	246,491,580	164,327,720
36	MEKARSARI	JELAPAT II	446,892,500	268,135,500	178,757,000
37	MEKARSARI	TAMBAN RAYA	428,855,900	257,313,540	171,542,360
38	MEKARSARI	TAMBAN RAYA BARU	374,746,000	224,847,600	149,898,400
39	MEKARSARI	MEKARSARI	410,819,300	246,491,580	164,327,720
40	ANJIR PASAR	MENTAREN	374,746,000	224,847,600	149,898,400
41	ANJIR PASAR	GANDARAYA	356,709,300	214,025,580	142,683,720
42	ANJIR PASAR	GANDARIA	374,746,000	224,847,600	149,898,400
43	ANJIR PASAR	DANAU KARYA	356,709,300	214,025,580	142,683,720
44	ANJIR PASAR	PANDAN SARI	356,709,300	214,025,580	142,683,720
45	ANJIR PASAR	ANJIR SEBERANG PASAR II	392,782,600	235,669,560	157,113,040
46	ANJIR PASAR	BANYIUR	374,746,000	224,847,600	149,898,400
47	ANJIR PASAR	ANJIR SEBERANG PASAR	392,782,600	235,669,560	157,113,040
48	ANJIR PASAR	ANDAMAN	392,782,600	235,669,560	157,113,040
49	ANJIR PASAR	HILIR MESJID	356,709,300	214,025,580	142,683,720
50	ANJIR PASAR	ANJIR PASAR KOTA II	392,782,600	235,669,560	157,113,040

51	ANJIR PASAR	ANJIR PASAR LAMA	428,855,900	257,313,540	171,542,360
52	ANJIR PASAR	ANDAMAN II	374,746,000	224,847,600	149,898,400
53	ANJIR PASAR	ANJIR PASAR KOTA	392,782,600	235,669,560	157,113,040
54	ANJIR PASAR	BARUNAI BARU	374,746,000	224,847,600	149,898,400
55	ANJIR MUARA	ANJIR SERAPAT BARU I	410,819,300	246,491,580	164,327,720
56	ANJIR MUARA	ANJIR SERAPAT MUARA	410,819,300	246,491,580	164,327,720
57	ANJIR MUARA	ANJIR SERAPAT LAMA	392,782,600	235,669,560	157,113,040
58	ANJIR MUARA	SUNGAI PUNGGU LAMA	410,819,300	246,491,580	164,327,720
59	ANJIR MUARA	PATIH MUHUR BARU	392,782,600	235,669,560	157,113,040
60	ANJIR MUARA	ANJIR SERAPAT BARU	410,819,300	246,491,580	164,327,720
61	ANJIR MUARA	SEPAKAT BERSAMA	392,782,600	235,669,560	157,113,040
62	ANJIR MUARA	ANJIR SERAPAT MUARA I	410,819,300	246,491,580	164,327,720
63	ANJIR MUARA	PATIH MUHUR LAMA	392,782,600	235,669,560	157,113,040
64	ANJIR MUARA	SUNGAI PUNGGU BARU	410,819,300	246,491,580	164,327,720
65	ANJIR MUARA	ANJIR MUARA KOTA TENGAH	392,782,600	235,669,560	157,113,040
66	ANJIR MUARA	MARABAHAN BARU	374,746,000	224,847,600	149,898,400
67	ANJIR MUARA	ANJIR MUARA KOTA	392,782,600	235,669,560	157,113,040
68	ANJIR MUARA	BERINGIN JAYA	374,746,000	224,847,600	149,898,400
69	ANJIR MUARA	ANJIR MUARA LAMA	374,746,000	224,847,600	149,898,400
70	ALALAK	SUNGAI LUMBAH	410,819,300	246,491,580	164,327,720
71	ALALAK	SUNGAI PITUNG	392,782,600	235,669,560	157,113,040
72	ALALAK	BELANDEAN	410,819,300	246,491,580	164,327,720
73	ALALAK	PULAU SUGARA	410,819,300	246,491,580	164,327,720
74	ALALAK	SEMANGAT BAKTI	374,746,000	224,847,600	149,898,400
75	ALALAK	PULAU ALALAK	428,855,900	257,313,540	171,542,360
76	ALALAK	BELANDEAN MUARA	392,782,600	235,669,560	157,113,040
77	ALALAK	SEMANGAT KARYA	374,746,000	224,847,600	149,898,400
78	ALALAK	TATAH MESJID	392,782,600	235,669,560	157,113,040
79	ALALAK	PANCA KARYA	374,746,000	224,847,600	149,898,400
80	ALALAK	BERINGIN	392,782,600	235,669,560	157,113,040
81	ALALAK	PULAU SEWANGI	374,746,000	224,847,600	149,898,400
82	ALALAK	TANJUNG HARAPAN	356,709,300	214,025,580	142,683,720
83	ALALAK	BERANGAS TIMUR	392,782,600	235,669,560	157,113,040
84	ALALAK	SEMANGAT DALAM	392,782,600	235,669,560	157,113,040
85	MANDASTANA	SUNGAI RAMANIA	392,782,600	235,669,560	157,113,040
86	MANDASTANA	TATAH ALAYUNG	392,782,600	235,669,560	157,113,040
87	MANDASTANA	ANTASAN SEGARA	392,782,600	235,669,560	157,113,040
88	MANDASTANA	PUNTIK LUAR	410,819,300	246,491,580	164,327,720
89	MANDASTANA	PANTAI HAMBAWANG	392,782,600	235,669,560	157,113,040
90	MANDASTANA	LOK RAWA	392,782,600	235,669,560	157,113,040
91	MANDASTANA	TANIPAH	374,746,000	224,847,600	149,898,400
92	MANDASTANA	KARANG INDAH	374,746,000	224,847,600	149,898,400
93	MANDASTANA	TERANTANG	410,819,300	246,491,580	164,327,720
94	MANDASTANA	BANGKIT BARU	356,709,300	214,025,580	142,683,720
95	MANDASTANA	KARANG BUNGA	374,746,000	224,847,600	149,898,400
96	MANDASTANA	PUNTIK DALAM	356,709,300	214,025,580	142,683,720
97	MANDASTANA	PUNTIK TENGAH	374,746,000	224,847,600	149,898,400
98	MANDASTANA	TABING RIMBAH	374,746,000	224,847,600	149,898,400
99	JEJANGKIT	CAHAYA BARU	392,782,600	235,669,560	157,113,040
100	JEJANGKIT	BAHANDANG	410,819,300	246,491,580	164,327,720
101	JEJANGKIT	SAMPURNA	392,782,600	235,669,560	157,113,040
102	JEJANGKIT	JEJANGKIT MUARA	392,782,600	235,669,560	157,113,040
103	JEJANGKIT	JEJANGKIT PASAR	410,819,300	246,491,580	164,327,720
104	JEJANGKIT	JEJANGKIT BARAT	392,782,600	235,669,560	157,113,040
105	JEJANGKIT	JEJANGKIT TIMUR	410,819,300	246,491,580	164,327,720
106	BELAWANG	RANGGA SURYA	392,782,600	235,669,560	157,113,040
107	BELAWANG	PATIH SALERA	410,819,300	246,491,580	164,327,720
108	BELAWANG	SAMUDA	374,746,000	224,847,600	149,898,400
109	BELAWANG	MURUNG KERAMAT	392,782,600	235,669,560	157,113,040
110	BELAWANG	PARIMATA	356,709,300	214,025,580	142,683,720

111	BELAWANG	SUKARAMAI	374,746,000	224,847,600	149,898,400
112	BELAWANG	BAMBANGIN	374,746,000	224,847,600	149,898,400
113	BELAWANG	BINAAN BARU	356,709,300	214,025,580	142,683,720
114	BELAWANG	KARANG BUAH	374,746,000	224,847,600	149,898,400
115	BELAWANG	SUNGAI SELUANG	356,709,300	214,025,580	142,683,720
116	BELAWANG	KARANG DUKUH	374,746,000	224,847,600	149,898,400
117	BELAWANG	BELAWANG	374,746,000	224,847,600	149,898,400
118	BELAWANG	SUNGAI SELUANG PASAR	338,672,700	203,203,620	135,469,080
119	WANARAYA	WARINGIN KENCANA	392,782,600	235,669,560	157,113,040
120	WANARAYA	ROHAM RAYA	392,782,600	235,669,560	157,113,040
121	WANARAYA	BABAT RAYA	374,746,000	224,847,600	149,898,400
122	WANARAYA	PINANG HABANG	356,709,300	214,025,580	142,683,720
123	WANARAYA	DWI PASARI	374,746,000	224,847,600	149,898,400
124	WANARAYA	TUMIH	356,709,300	214,025,580	142,683,720
125	WANARAYA	SIDOMULYO	374,746,000	224,847,600	149,898,400
126	WANARAYA	KOLAM KIRI	356,709,300	214,025,580	142,683,720
127	WANARAYA	SUMBER RAHAYU	374,746,000	224,847,600	149,898,400
128	WANARAYA	SIMPANG JAYA	356,709,300	214,025,580	142,683,720
129	WANARAYA	KOLAM KANAN	356,709,300	214,025,580	142,683,720
130	WANARAYA	SURYA KANTA	392,782,600	235,669,560	157,113,040
131	WANARAYA	KOLAM MAKMUR	374,746,000	224,847,600	149,898,400
132	BARAMBAI	KARYA TANI	374,746,000	224,847,600	149,898,400
133	BARAMBAI	SUNGAI KALI	392,782,600	235,669,560	157,113,040
134	BARAMBAI	KARYA BARU	356,709,300	214,025,580	142,683,720
135	BARAMBAI	HANDIL BARABAI	356,709,300	214,025,580	142,683,720
136	BARAMBAI	BAGAGAP	410,819,300	246,491,580	164,327,720
137	BARAMBAI	PENDALAMAN BARU	374,746,000	224,847,600	149,898,400
138	BARAMBAI	PENDALAMAN	356,709,300	214,025,580	142,683,720
139	BARAMBAI	BARAMBAI	374,746,000	224,847,600	149,898,400
140	BARAMBAI	KOLAM KIRI DALAM	374,746,000	224,847,600	149,898,400
141	BARAMBAI	BARAMBAI KOLAM KANAN	374,746,000	224,847,600	149,898,400
142	BARAMBAI	BARAMBAI KOLAM KIRI	392,782,600	235,669,560	157,113,040
143	RANTAU BADAUH	SUNGAI PANTAI	410,819,300	246,491,580	164,327,720
144	RANTAU BADAUH	SIMPANG ARJA	356,709,300	214,025,580	142,683,720
145	RANTAU BADAUH	DANDA JAYA	392,782,600	235,669,560	157,113,040
146	RANTAU BADAUH	SINAR BARU	338,672,700	203,203,620	135,469,080
147	RANTAU BADAUH	SUNGAI SAHURAI	392,782,600	235,669,560	157,113,040
148	RANTAU BADAUH	SUNGAI GAMPA	356,709,300	214,025,580	142,683,720
149	RANTAU BADAUH	PINDAHAN BARU	356,709,300	214,025,580	142,683,720
150	RANTAU BADAUH	SUNGAI BAMBAN	320,636,000	192,381,600	128,254,400
151	RANTAU BADAUH	SUNGAI GAMPA ASAHI	374,746,000	224,847,600	149,898,400
152	CERBON	BADANDAN	356,709,300	214,025,580	142,683,720
153	CERBON	SAWAHAN	374,746,000	224,847,600	149,898,400
154	CERBON	SIMPANG NUNGKI	338,672,700	203,203,620	135,469,080
155	CERBON	SUNGAI KAMBAT	338,672,700	203,203,620	135,469,080
156	CERBON	SUNGAI RAYA	302,599,400	181,559,640	121,039,760
157	CERBON	SUNGAI RASAU	320,636,000	192,381,600	128,254,400
158	CERBON	SUNGAI TUNJANG	320,636,000	192,381,600	128,254,400
159	CERBON	BANTUIL	338,672,700	203,203,620	135,469,080
160	BAKUMPAI	BANITAN	356,709,300	214,025,580	142,683,720
161	BAKUMPAI	PALINGKAU	410,819,300	246,491,580	164,327,720
162	BAKUMPAI	SUNGAI LIRIK	356,709,300	214,025,580	142,683,720
163	BAKUMPAI	MURUNG RAYA	338,672,700	203,203,620	135,469,080
164	BAKUMPAI	BENUA ANYAR	338,672,700	203,203,620	135,469,080
165	BAKUMPAI	BAHALAYUNG	338,672,700	203,203,620	135,469,080
166	BAKUMPAI	BATIK	374,746,000	224,847,600	149,898,400
167	BAKUMPAI	BALUKUNG	392,782,600	235,669,560	157,113,040
168	MARABAHAN	ANTAR JAYA	392,782,600	235,669,560	157,113,040
169	MARABAHAN	SIDO MAKMUR	356,709,300	214,025,580	142,683,720
170	MARABAHAN	ANTAR RAYA	374,746,000	224,847,600	149,898,400

171	MARABAHAN	ANTAR BARU	392,782,600	235,669,560	157,113,040
-----	-----------	------------	-------------	-------------	-------------

172	MARABAHAN	BAGUS	320,636,000	192,381,600	128,254,400
173	MARABAHAN	PENGHULU	302,599,400	181,559,640	121,039,760
174	MARABAHAN	BALUK	302,599,400	181,559,640	121,039,760
175	MARABAHAN	KARYA MAJU	356,709,300	214,025,580	142,683,720
176	TABUKAN	PANTANG RAYA	374,746,000	224,847,600	149,898,400
177	TABUKAN	TAMBA JAYA	410,819,300	246,491,580	164,327,720
178	TABUKAN	KARYA INDAH	374,746,000	224,847,600	149,898,400
179	TABUKAN	RANTAU BAMBAN	374,746,000	224,847,600	149,898,400
180	TABUKAN	KARYA MAKMUR	374,746,000	224,847,600	149,898,400
181	TABUKAN	PANTANG BARU	356,709,300	214,025,580	142,683,720
182	TABUKAN	KARYA JADI	392,782,600	235,669,560	157,113,040
183	TABUKAN	MUARA PULAU	428,855,900	257,313,540	171,542,360
184	TABUKAN	BANDAR KARYA	338,672,700	203,203,620	135,469,080
185	TABUKAN	TELUK TAMBA	338,672,700	203,203,620	135,469,080
186	TABUKAN	TABUKAN RAYA	338,672,700	203,203,620	135,469,080
187	KURIPAN	KABUAU	428,855,900	257,313,540	171,542,360
188	KURIPAN	ASIA BARU	428,855,900	257,313,540	171,542,360
189	KURIPAN	JAMBU BARU	446,892,500	268,135,500	178,757,000
190	KURIPAN	JAMBU	446,892,500	268,135,500	178,757,000
191	KURIPAN	KURIPAN	410,819,300	246,491,580	164,327,720
192	KURIPAN	TABATAN	428,855,900	257,313,540	171,542,360
193	KURIPAN	TABATAN BARU	428,855,900	257,313,540	171,542,360
194	KURIPAN	JARENANG	392,782,600	235,669,560	157,113,040
195	KURIPAN	RIMBUN TULANG	392,782,600	235,669,560	157,113,040
JUMLAH			74,897,165,370	44,938,299,222	29,958,866,148

BUPATI BARITO KUALA,



H. HASANUDDIN MURAD